

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 16 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MEMENUHI KEPATUHAN
PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

Skripsi

Oleh :

RIZKA PUTRI
1603100025

Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : **RIZKA PUTRI**
N P M : 1603100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, tanggal : Rabu, 11 Maret 2020
W a k't u : Pukul 07.30 WIB s/d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH,S.IP.,M.Pd**

PENGUJI II : **SYAFRUDDIN,S.Sos.,MH**

PENGUJI III : **DEDI AMRIZAL,S.Sos.,MSi**

PANITIA PENGUJI

Ketua,



Sekretaris,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSi

Drs. ZULFAHMI, M.LKom

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama Lengkap : **RIZKA PUTRI**
N.P.M : 1603100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MEMENUHI KEPATUHAN PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Medan, 18 Maret 2020

Dosen Pembimbing


DEDI AMRIAL, S.Sos., M.Si

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi


NALIL KHARIAH, S.IP., M.Pd


Dekan

DR. ARIFLY SALEH, S.Sos., MSP.

PERNYATAAN



Dengan ini saya, RIZKA PUTRI, NPM 1603100025, Menyatakan dengan sungguh-sungguh :


1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imblan, atau plagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplikan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis didalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima

Medan, Maret 2020

Yang Menyatakan


RIZKA PUTRI
NPM.1603100025

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012 DALAM RANGKA MEMENUHI KEPATUHAN PENERAPAN TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MANDAILING NATAL

OLEH :

RIZKA PUTRI

1603100025

Pelaksanaan retribusi parkir di Mandailing Natal diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam Peraturan Bupati tersebut menjelaskan bahwa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. selain itu, Perda tersebut menjelaskan pula mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal apakah telah dijalankan dengan baik atau belum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu data yang dikumpulkan dari hasil wawancara dari paranarasumber untuk mendeskripsikan Retribusi Jasa Umum Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir. Efektivitas Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum melalui wawancara terbuka dengan pihak Dinas Perhubungan dan masyarakat sebanyak 7 (tujuh) orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasi dengan baik, walaupun belum dapat dikatakan maksimal karena dari empat kategorisasi yang dijelaskan dua kategori sudah terlaksana yaitu adanya tujuan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir dan adanya program yang dijalankan dengan melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir. Sedangkan dua kategorisasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena masih banyak ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut. Adanya target yang dicapai belum efektif dikarenakan retribusi parkir belum mencapai target karena kurangnya wilayah tempat perparkiran

sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal.

Kata Kunci: Retribusi Parkir

KATA PENGANTAR



segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunia serta petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriringan salam juga penulis persembahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan bagi kehidupan didunia maupun akhirat.

Skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis Membuat Skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal”**.

Pada proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan pihak-pihak yang telah banyak membantu penyelesaian skripsi ini baik bantuan moril, materil, berupa petunjuk, bimbingan, nasehat, dan saran yang bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada :

1. Yang terutama dan paling utama kepada ALLAH SWT.

2. Teristimewa kepada Ayahanda penulis Irwan Yusuf dan Ibunda tercinta Tetty Yuni Erni serta adik Hafizh Al-Munawar Ariiq, Zaki Habibie Ariiq, dan Ighar Mujtahid Ariiq yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat dari awal sampai akhir kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.Ap selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Plt Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dedi Amrizal., S.Sos.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan kesempatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
7. Dosen–dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai dan biro yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan urusan administrasi penulis.
9. Bapak Ramlan Taufik S.Sos selaku Sekretaris Dinas Perhubungan kota Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.

10. Para narasumber yang disertakan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
11. Kepada sahabat yang terbaik Puspa, windi, zulfah dan wulan yang senantiasa menemani penulis dalam pengerjaan skripsi dan telah banyak memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.
12. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya perkuliahan dan selalu memberikan dukungan serta bantuannya khususnya stambuk 2014 Ilmu Administrasi Negara.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunianya serta membalas segala budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Medan, April 2020

Yang Menyatakan

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	5
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
4. Sistematika Penulisan.....	6

BAB II URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi	8
2. Pengertian Kebijakan	9
3. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
4. Pengertian Implementasi Kebijakan	13
5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	14
6. Pengetian Retribusi	16
7. Pengertian Parkir.....	17

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	19
2. Kerangka Konsep	20
3. Defenisi Konsep	21
4. Kategorisasi	22
5. Narasumber	22
6. Teknik Pengumpulan Data	24
7. Teknik Analisis Data.....	24
8. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
9. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Data	36
2. Deskripsi Hasil Wawancara.....	36
3. Pembahasan.....	51

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Mandailing Natal	4
Tabel 4.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 4.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur.....	37
Tabel 4.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan	38
Tabel 4.5 Realisasi Pencapaian Target Retribusi Parkir	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	20
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Mandailing Natal ...	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Pertanyaan Wawancara
Lampiran III	: Surat Keterangan Bebas Pustaka
Lampiran IV	: SK-1 Surat Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran V	: SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi
Lampiran VI	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran VII	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VIII	: SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran IX	: Surat Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran X	: Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan di Mandailing Natal, terutama pada informasi, komunikasi dan transportasi dalam kehidupan masyarakat di segala bidang ekonomi dan perdagangan pembangunan ekonomi merupakan sesuatu tahapan kegiatan untuk menjadikan Mandailing Natal lebih maju. Dalam perkembangan ini pemerintah wajib membuat wewenang dan mengurus kepentingan masyarakat serta memberikan jasa umum. Peran pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah.

Karena pesatnya perkembangan membuat kabupaten Mandailing Natal memiliki penduduk yang cukup padat sebagian masyarakat memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas yang memudahkan mereka untuk membeli kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding dengan transportasi umum. Kendaraan pribadi memerlukan tempat berhenti yang bersifat tidak sementara dengan jangka waktu tertentu dan ditinggal oleh pengemudinya yaitu berupa fasilitas parkir. Setiap hari banyak kendaraan yang terparkir ditepi jalan umum, ini merupakan salah satu potensi yang dimiliki kabupaten Mandailing Natal dari sektor retrebusi parkir untuk menunjang pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan pengelolaan retribusi pelayanan parkir di Mandailing Natal diatur dalam Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 menjelaskan bahwa objek retribusi jasa umum adalah yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi dan badan. Jenis retribusi dalam bupati ini adalah Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Dengan nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan yang diberikan yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum. selain itu, Perda tersebut juga menjelaskan mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir.

Retribusi parkir merupakan salah satu potensi yang dikelola untuk dijadikan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal tersebut menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat pendapatan asli daerah yang diperoleh wilayah tersebut. Hasil dari pendapatan tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan wilayah itu sendiri, khususnya dalam membangun fasilitas dan sarana perbaikan lahan parkir yang berdampak pada tatakelola dalam pelaksanaan parkir berjalan dengan baik dan tidak mengganggu pengguna jalan lainnya

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Dengan kata lain, agar adanya kejelasan secara pasti mengenai jumlah

tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu peraturan bupati tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di Mandailing Natal agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Permasalahan pemungutan retribusi parkir di Mandailing Natal sering terjadi kejanggalan mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir di luar dari tarif yang sudah ditentukan sehingga hanya terkesan mencari keuntungan semata tanpa memperhatikan keamanan kendaraan dari pengguna jasa parkir. Dilihat dari pihak pengguna jasa parkir, sering mereka hanya sekedar membayar retribusi parkir sesuai dengan kebiasaan saja tanpa pernah memperhatikan tarif yang telah ditentukan oleh peraturan daerah.

Melalui penetapan pengelolaan parkir ditepi jalan umum, maka pemerintah daerah juga menetapkan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum. Besaran retribusi parkir di tepi jalan umum ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan untuk satu kali parkir. Terjadi penyesuaian besaran tarif retribusi parkir di tepi jalan umum yang bertujuan untuk memberikan kontribusi penerimaan yang signifikan bagi retribusi parkir di tepi jalan umum. Penyesuaian tarif yang dilakukan juga berdasarkan

ruang parkir yang disediakan dan perkembangan perekonomian di wilayah mandailing natal. Tarif harga parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir sangat berbeda dengan tarif harga parkir yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Pasal 8 mengenai tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp. 1000, kendaraan bermotor roda 4 sebesar Rp. 2000, mobil barang pick up sebesar Rp. 2.000, mobil bus, truk, mobil tangki sebesar Rp. 2.500, Dimana dengan adanya penyesuaian tarif ini akan terjadi peningkatan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, sehingga bisa memberikan kontribusi bagi penerimaan retribusi daerah secara umum.

Diperoleh bahwa pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan. apabila dikelola dengan serius dan strategi yang tepat, maka penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum akan memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan retribusi daerah secara khusus. Hal ini tergambar dari tabel target dan realisasi pendapatan sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1

Taget dan Realisasi Retribusi Parkir

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2016	85.508,994,820	70.700,225,824,15	82,86%
2.	2017	104.661,769,563,05	80.965,336,073,02	77,36%

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2017 realisasi retribusi parkir di Kabupaten Mandailing Natal tidak memenuhi target.

Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 target yang dicapai oleh pemerintah belum terealisasikan. Kemudian, pada Tahun 2017 persentase realisasi retribusi parkir di Kabupaten Mandailing Natal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi yang berubah-ubah dari tahun 2016-2017, juga tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Salah satunya disebabkan oleh munculnya tukang atau juru parkir dilahan parkir yang illegal dan juga menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar dari tarif yang sudah ditentukan.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan adanya masalah yang dihadapi saat ini tentang kepatuhan penerapan retribusi parkir di tepi jalan umum, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah peneliti adalah Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal.

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan disiplin ilmu peneliti maka tujuan peneliti yang akan dilaksanakan berdasarkan atas bidang Ilmu Administrasi Publik untuk mengetahui

Implementasi Peraturan Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal.

3.2 Manfaat Penelitian

- a. penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan penulis mengenai retribusi pelayanan parkir.
- b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan tolak ukur dalam meningkatkan pendapatan daerah Mandailing Natal.
- c. penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang sosial melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik.

4. Sistematika Penulisan

4.1 Pendahuluan

Pada Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

4.2 Uraian Teoritis

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian seperti Implementasi, Kebijakan, Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, retribusi serta parkir.

4.3 Metode Penelitian

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi Penelitian.

4.4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang penyajian data hasil dari penelitian serta pembahasan tentang permasalahan yang diteliti

4.5 Penutup

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran

BAB II

URAIAN TEORITIS

1. Pengertian Implementasi

Setiawan (2004:39) menyatakan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

Sedangkan Wahab (2004:68) mengatakan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dan biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan peradilan. Keputusan tersebut haruslah mengidentifikasi masalah yang ingin diselesaikan dan menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dalam mengatur proses implementasinya.

Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program adalah unsur pertama yang harus dicapai demi tercapainya kegiatan terimplementasi karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek antara lain ; a) adanya tujuan yang akan dicapai, b) adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui, c) adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan

prosedur yang harus dilalui, d) adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, e) adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dengan adanya program, maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan, dan yang harus dipenuhi dalam proses implementasi yaitu adanya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program sehingga masyarakat tersebut akan menerima manfaat program yang dijalankan serta terjadinya perubahan dan peningkatan dalam kehidupan tanpa memberikan manfaat kepada masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa tersebut gagal atau tidaknya dilaksanakan.

Implementasi juga dapat dilihat dari kemampuan pembuatan kebijakan dalam mengoperasionalkan program-program. Kebijakan yang telah direkomendasi untuk dipilih bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam pelaksanaannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuatan kebijakan untuk mempengaruhi perilaku biokrat pelaksanaan agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

2. Pengertian Kebijakan

Wahab menyatakan (2004:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah

dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya ketegasan tertentu sekaligus mencari sasaran peluang-peluang agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nugroho (2014:32) juga mendefenisikan bahwa kebijakan adalah keputusan autoritatif keputusan yang dibuat oleh orang yang memegang kekuasaan, formal atau Informal.

Sedangkan Mustopadidjaja (2003:72) mengemukakan bahwa kebijakan adalah keputusan tertentu suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam ; a) pengambilan keputusan lebih lanjut yang dilakukan baik dalam kelompok sasaran atau unit organisasi pelaksana keijakan. b) penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam baik dalam hubungan dengan unit organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan untuk menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai dan mengkomunikasikan substansi kebijakan

3. Kebijakan Publik

Nugroho (2014:244) menyatakan kebijakan publik adalah aturan main yang dilegalkan dengan undang-undang. Kondisi ideal adalah bahwa kebijakan publik mencerminkan keyakinan akan kebaikan (yaitu nilai-nilai dan norma-norma) yang berlangsung dalam proses politik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga politik. Sementara Abidin (2006:22) menyatakan bahwa kebijakan

publik adalah intervensi pemerintah yang bertujuan untuk mengubah kondisi yang ada atau yang mempengaruhi arah dan kecepatan perubahan yang sedang berlangsung dalam masyarakat, tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada starta strategis. Sebab itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan-keputusan khusus dibawahnya.

Dunn (1998:22) juga mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasyarakat dimana dalam penyusunannya melalui berbagai tahap. Tahap-tahap kebijakan menurut Dunn yaitu adanya Penyusunan Agenda. Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan.

Formulasi Kebijakan, Masalah yang sudah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan . masalah-masalah tadi didefenisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

Adopsi/Legitimasi Kebijakan, Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintahnya. Namun, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah mendukung dukungan rezim cenderung berdisfusi-cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolelir pemerintahan disonsasi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Dimana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

Penilaian Evaluasi Kebijakan, Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

4. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nugroho (2004:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik maka ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Subarsono (2005:101) beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistik diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Winarno (2005:102) juga mendefinisikan implementasi kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu

tertentu. Pengertian yang demikian ini merupakan pengertian yang sederhana, tetapi dengan kesederhanaan rumusan tidak berarti bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaannya menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan keorganisasian, implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan dan memerlukan dua macam tindakan yang berurutan yang pertama merumuskan tindakan apa yang harus dilakukan dan yang kedua melaksanakan tindakan yang dirumuskan tadi.

Secara garis besar kita dapat mengatakan bahwa fungsi implementasi itu ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bentuk program-program melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.

5. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Aneta (2010:55) implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi

jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk.

Selain itu, menurut Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Tachjan (2006:26) implementasi kebijakan publik yang mutlak meliputi; a) adanya program yang akan dilaksanakan, yakni dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administrasi dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang dan tujuan-tujuan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai, b) adanya target yang akan dicapai, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan peningkatan, c) adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan, unsur pelaksana, baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu program guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

6. Pengertian Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan publik yang telah menggunakan jasa-jasa negara. Artinya, retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Nugroho retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Siahaan (2019:5) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari negara.

Sedangkan menurut Yani (2004:63) retribusi ialah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa ataupun pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi maupun suatu badan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

7. Pengertian Parkir

Menurut Ilosa (2016:108) parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan yang menginginkan kendaraannya dapat parkir di tempat yang mudah dicapai, salah satunya adalah di tepi jalan umum. Sedangkan menurut Kusumaningtyas (2016:17) parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraan parkir ditempat. Dimana tempat tersebut mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan. Untuk itu pola parkir yang ada di badan jalan adalah pola parkir paralel dan menyudut akan tetapi tidak selalu parkir di badan yang diizinkan karena kondisi arus lalu lintas yang tidak memungkinkan.

Siahaan (2019:470) mengetakan bahwa dalam pemungutan pajak parkir terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut yaitu ; a) tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh pribadi atau badan,b) pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa, c) pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya, d) gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan yang berupa gedung milik pem rintah/swasta atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan, e) pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/swasta, orang pribadi atau badan diluar badan jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka, f) garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, g) tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang bidang yang

dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu dan atau diperjualbelikan, h) kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang atau badan di jalan.

Pada pajak parkir, subjek parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar pajak parkir yang terutang.

Dengan demikian, pada pajak parkir subjek parkir dan wajib parkir tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa parkir adalah ruang atau bidang yang dipakai untuk menaruh, menyimpan, meletakkan barang yang bersifat sementara.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan di lapangan.

Metode deskriptif hanyalah memaparkan situasi dan peristiwa. Penelitian dengan metode ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis, atau membuat prediksi dan hanya menganalisis kebenarannya berdasarkan fakta yang diperoleh.

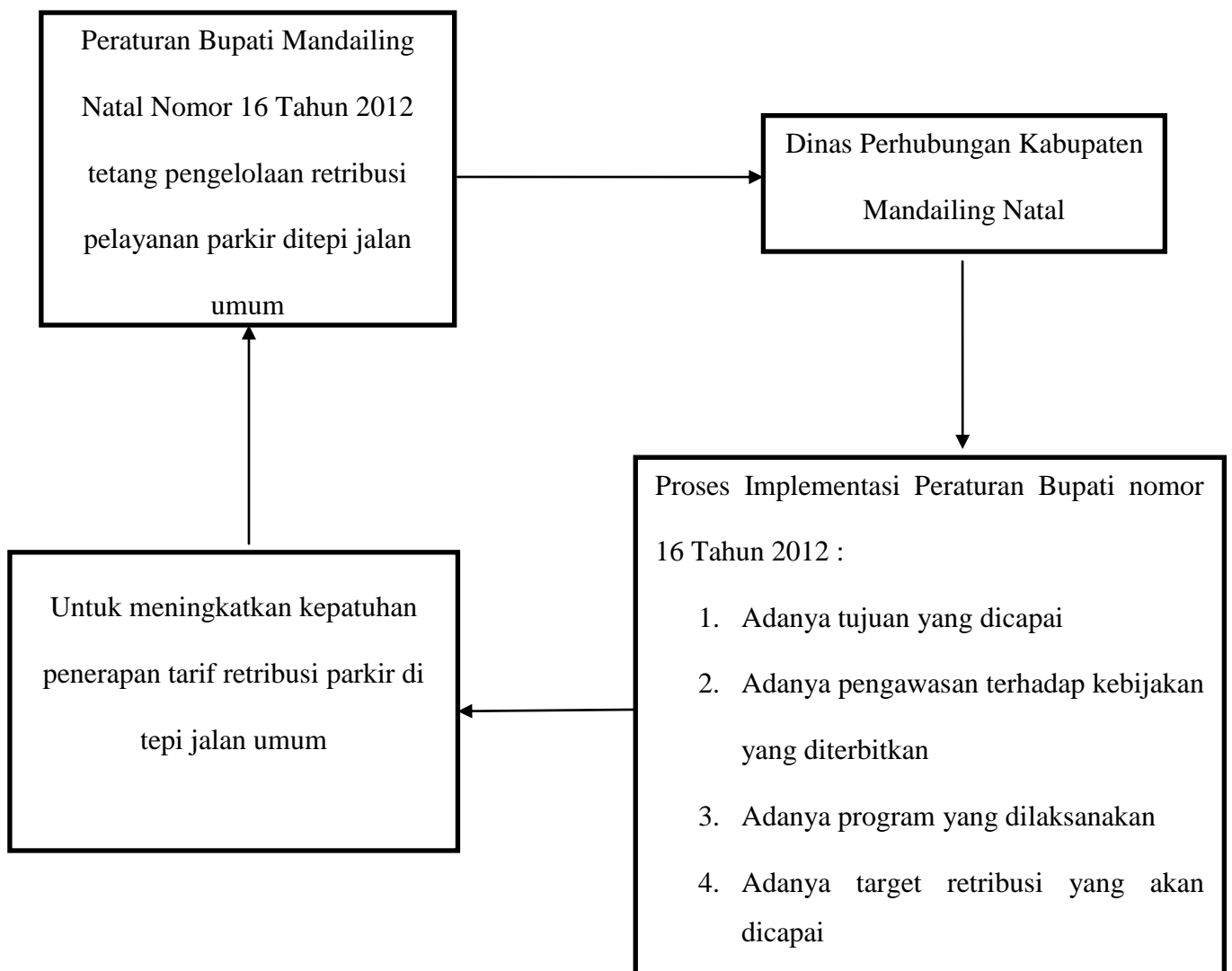
Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan kepada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif.

2. Kerangka Konsep

Sebagai pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1

Kerangka Konsep



3. Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristikjumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
- b. Kebijakan adalah suatu intelektual untuk menciptakan, menerapkan, secara krisis menilai dan mengkomunikasikan subtansi kebijakan.
- c. Kebijakan Publik adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.
- d. Implementasi Kebijakan merupakan bentuk program-program melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi.
- e. Implementasi Kebijakan Publik merupakan tahapan untuk menjalankan suatu program guna mengintervensi masyarakat dalam melakukan segala sesuatu agar tidak terjadi kesimpangan-kesimpangan yang terjadi dimasyarakat.

- f. Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- g. Parkir adalah ruang atau bidang yang dipakai untuk menaruh, menyimpan, meletakkan barang yang bersifat sementara.

4. Kategorisasi

Kategorisasi adalah salah satu dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran institusi, pendapat atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur satu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung dan merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan oleh kebijakan yang ditetapkan dan disetujui. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang dicapai
2. Adanya target yang akan dicapai
3. Adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan
4. Adanya program yang dilaksanakan

5. Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber, untuk memberikan pandangan terhadap Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16

Tahun 2012 dalam rangka pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum di mandailing natal yang diharapkan informasinya dapat dijadikan data.

1. Pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal

a. Nama : Ramlan Daulay S.Sos

Umur : 39 tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

b. Nama : Mangatas Tua S.T

Umur : 37 tahun

Jabatan : Kepala Badan Sarana dan Prasarana

2. Pengelola Parkir

a. Nama : Alfi Anwar

Umur : 28 tahun

b. Nama : Burhan

Umur : 36 tahun

3. Pengguna Parkir

a. Nama : Khairul Anwar

Umur : 49 tahun

b. Nama : Dedi Iskandar

Umur : 30 tahun

c. Nama : Nurhasanah

Umur : 42 tahun

6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2012:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik atau metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah Teknik Wawancara.

Menurut Nazir (2003:193-194) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (paduan wawancara). Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara indepth interview.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kategorisasi. Data yang didapat akan dipilah berdasarkan kategori-kategori yang ada dan tiap-tiap kategori diberi kesimpulan. Maka penelitian ini diambil dari kesimpulan-kesimpulan tiap-tiap kategori.

8. Lokasi dan waktu penelitian

Moleong (2004:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara baik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subitatif dan menjajaki lapangan memncari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan lokasi penelitian.

Adapun Lokasi Penelitian yaitu di Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal. Dinas ini diambil sebagai lokasi penelitian karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan di dinas tersebut dan apa saja kendala yang terdapat dalam pelaksanaannya.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan Januari sampai dengan Maret 2020 yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

9. Deskripsi Lokasi Penelitian

9.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal berdiri pada tanggal 10 April 2001 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan. Kantor Dinas Perhubungan merupakan sebuah instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi di sektor perhubungan darat, laut, dan udara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di perhubungan darat, laut, dan udara tentunya mempunyai visi misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi pemerintah Negara. Yang mana visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

9.2 Telaah Visi dan Misi dan Program RPJMD

Visi dan Misi Kabupaten Mandailing Natal untuk tahun 2016-2021 yaitu *“Mandailing Natal Yang Berkedaulatan Pangan, Mandiri Ekonomi, Sehat, Cerdas, Didukung Sarana dan Prasarana, Infrastruktur Yang Kuat Serta Masyarakat Religius dan Berbudaya”* merupakan perwujudan dari Visi dan Misi pasangan Drs. H. Dahlan Nasution dan H Muhammad Ja’far Sukhairi Nasution yang terpilih menjadi Bupati Mandailing Natal Periode 2016-2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal 2016-2021 merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari pada Visi dan Misi tersebut.

9.3 Visi

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah;

1. Berkedaulatan Pangan adalah masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya secara mandiri yang bersumber dari hasil-hasil pertanian dari daerah sendiri (swasembada)
2. Mandiri Ekonomi adalah masyarakat yang meningkat ekonominya dan dari hasil usaha dan pengolahan kekayaan alam dengan system ekonomi kerakyatan serta inovasi dalam pengolahan sumber daya alam
3. Sehat adalah masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani didukung oleh lingkungan dan pola hidup yang sehat

4. Cerdas adalah terciptanya masyarakat berpendidikan yang selaras anatara ilmu dan akal, dan spiritual mulai dari masyarakat jenjang pendidikan formal dan informal
5. Sarana Prasarana Infrastruktur Yang Kuat adalah terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur dengan focus pada penciptaan aksesibilitas didaerah-daerah yang masih termasuk kategori terpencil serta perbaikan pada infrastruktur dasar dan pendukung kegiatan perekonomian masyarakat
6. Masyarakat Yang Religius adalah terwujudnya masyarakat yang mengemban nilai-nilai agama
7. Berbudaya adalah terwujudnya masyarakat yang memgang teguh nilai-nilai positif kekayaan budaya dan adat daerah sebagai warisan yang tak ternilai harganya bagi generasi yang akan datang
8. Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi dimasa mendatang

Aplikasi dari visi sebagaimana di uraikan diatas, sangat tergantung pada sebuah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan/stakeholder yang ada di Kabupaten Mandailing Natal dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan guna sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan tercapai jika kita menentukan sasaran pokok yang terurai dalam sebuah misi.

Sejalan dengan visi misi yang disampaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah waktu Pilkada hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat khususnya yang tinggal di pantai barat Kabupaten Mandailing Natal, hambatan/permasalahan yang ada akan berubah menjadi tantangan untuk masa 5 (lima) tahun kedepan.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan sehat dan sejahtera misinya adalah meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi derajat pendidikan, kesehatan dan pencapaian standar hidup layak bagi masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.

9.4 Misi

Untuk memenuhi visi tersebut diatas diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta dukungan DPRD kabupaten Mandailing Natal dalam melanjutkan 3 (tiga) tugas pokok dan fungsi yaitu pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. landasan mewujudkan visi tersebut tertuang dalam misi kabupaten Mandailing natal yang akan dicapai tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan

2. Mewujudkan kemandirian ekonomi
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, infrastruktur, permukiman, dan membuka akses ke daerah-daerah terisolir dan tertinggal
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama
7. Melestarikan adat dan budaya daerah
8. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa serta anti korupsi
9. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan

9.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang harus segera ditangani dan akan menjadi tantangan dan permasalahan untuk 5 (lima) Tahun kedepan. Berdasarkan analisis dari permasalahan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir masih kurangnya kualitas dan kuantitas dan kuantitas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Adapun isu strategis tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas mutu pendidikan aparatur perhubungan, ditandai dengan masih rendahnya mutu penyelenggaraan perhubungan yang masih rendah.
2. Peningkatan sumber daya aparatur dibidang perhubungan.

Dalam rangka menentukan isu strategis dan strategi pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal menggunakan teknik analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Threat), Analisis ini dibagi kedalam 2 (dua) faktor yaitu faktor internal (Strength = Kekuatan dan Weakness = Kelemahan) serta faktor eksternal (Opportunity = Peluang dan Thereat = Tantangan).

Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal mempunyai kedudukan sebagai salah satu unsur pendukung tugas Kepala Daerah di Bidang Pelayanan Perhubungan. Pelayanan Perhubungan merupakan hak dasar bagi warga negara seperti halnya pendidikan sebagai upaya membangun sumber daya manusia karna berpengaruh langsung terhadap pembangunan dan kemajuan perekonomian Masyarakat.

Pendekatan analisis SWOT yaitu untuk melihat komplektisitas permasalahan Dinas Perhubungan Mandailing Natal sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang dengan analisis sebagai berikut :

- a. Kekuatan (Strength) yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi misi meliputi :

1. Tersedianya ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, baik berupa undang-undang sampai keperaturan daerah
2. Lokasi Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal yang cukup strategis dan mudah dicapai oleh Masyarakat
3. Tersedianya sumber daya manusia
4. Tersedianya sarana perkantoran, gedung pengujian kendaraan bermotor, dan UPT di Kecamatan Natal dan Kotanopan
5. Adanya kendaraan Dinas Operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
6. Tersedianya sarana perlengkapan administrasi Adanya komitmen dari Kepala Daerah untuk pembangunan sektor perhubungan darat, laut dan udara
7. Adanya dukungan anggaran
8. Letak geografis daerah yang merupakan penghubung daerah sekitarnya, sehingga potensial untuk pengembangan angkutan penumpang, penyediaan Bandar Udara, penyediaan pelabuhan dan terminal

b. Kelemahan (Weakness) yaitu situasi dan ketidakmampuan internal yang mengakibatkan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal tidak dapat atau gagal dalam mencapai visi dan misi :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur yang menguasai perhubungan
2. Perlu penambahan sarana dan prasarana terutama fasilitas lalu lintas di pusat kota

3. System informasi dan pengelolaan manajemen Dinas Perhubungan belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan
4. Kemampuan pendanaan sering menjadi hambatan pelaksanaan program
5. Belum terisinya seluruh jabatan struktural dan fungsional
6. Tugas bidang perhubungan laut dan udara belum terlaksana dengan maksimal
7. Lalu lintas di pusat kota terkesan tidak tertib

c. Ancaman (Threats) dating sebagai faktor external meliputi :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan lalu lintas
2. Angka kecelakaan masih tinggi
3. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM
4. Banyaknya angkutan penumpang illegal baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat)
5. Lemahnya kesadaran masyarakat membayar retribusi
6. Mahalnya biaya pembangunan infrastruktur perhubungan
7. Tingginya pelanggaran lalu lintas

Dari identifikasi faktor internal dan external tersebut maka selanjutnya disusun matrix SWOT sehingga dapat ditentukan strategi apa yang diperkirakan cocok untuk pengembangan sektor Perhubungan Mandailing Natal.

9.6 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal memiliki tugas melaksanakan keselamatan penumpang dan informasi dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Isu Bidang Perhubungan;
 - a. Kurangnya bidang SDM baik kuantitas maupun kompetensi
 - b. Minimnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan
 - c. Lalu lintas yang tidak nyaman di Ibukota Kabupaten maupun Kecamatan karena Terminal belum ada
2. Melengkapi sarana dan prasarana perhubungan dan sarana administrasi dan perkantoran.

Dalam menjalankan fungsi pelayanan keselamatan penumpang Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal kepada Masyarakat luas sering tidak terlayani secara optimal akibat kendala-kendala yang ada sehingga Masyarakat tidak dapat merasakan pelayan prima, isu dan masalah mendesak adalah:

- a. Pelayanan Dinas Perhubungan dalam keselamatan penumpang disarankan masih kurang disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap angkutan dan lalu lintas
- b. Dinas Perhubungan belum bisa mengawasi jaringan informasi yang berkembang disebabkan masih kurangnya peraturan yang mengatur hal tersebut.

9.7 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Mandailing Natal

Dalam sebuah instansi yang disebut sebagai organisasi harus ada suatu susunan yang dipakai sebagai dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih terkoordinir. Dan susunan ini dapat disebut sebagai struktur organisasi. Yang mana bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagai organisasi atau lembaga pemerintah negara memiliki struktur organisasi.

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang dalam suatu organisasi tersebut. Struktur organisasi akan nampak lebih jelas apabila digambarkan dalam bentuk bagan organisasi yang menunjukkan hubungan, aliran organisasi dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi

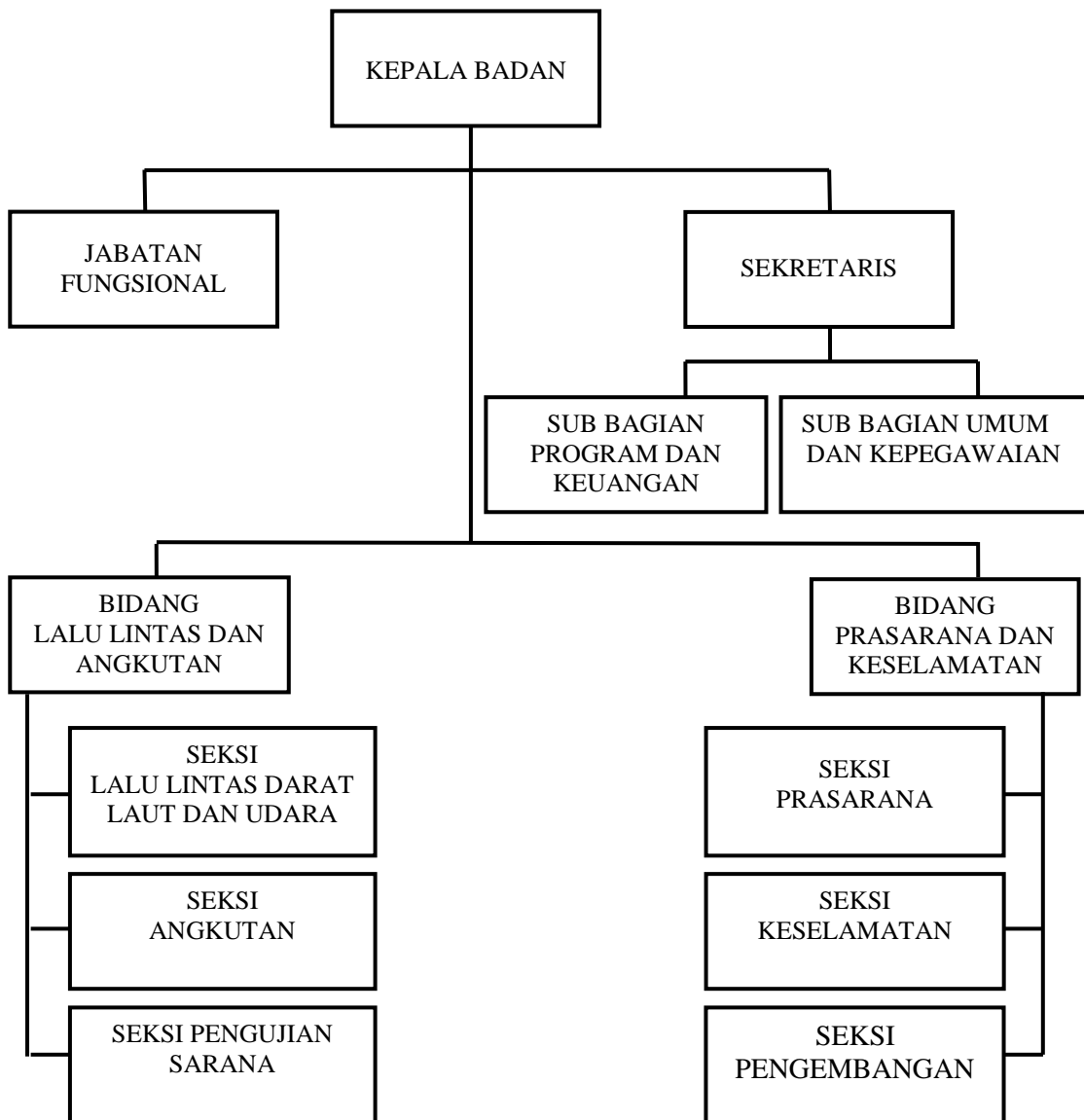
Susunan organisasi Dinas Perhubungan Mandailing Natal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretrariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas Darat, Laut, dan Udara
 - b. Seksi Angkutan Jalan
 - c. Seksi Pengujian Sarana
- d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, Membawahi:
 - a. Seksi Prasarana

- b. Seksi Keselamatan
- c. Seksi Pengembangan
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 3.1

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penyajian Data

Bab ini membahas dan menyajikan data yang telah didapat dari hasil penelitian lapangan atau yang dikenal dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab dengan narasumber yang berwenang untuk menjawab pernyataan dan kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah 2 orang dari pihak Dinas Perhubungan Mandailing Natal dan 5 orang diantaranya pengelola parkir dan pengguna parkir/masyarakat.

2. Deskripsi Narasumber

2.1 Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

Deskripsi narasumber berdasarkan jenis kelamin akan dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu narasumber dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada tabel 4.1 berikut akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori

Tabel 4.1

Deskripsi Narasumber Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	6	85,71%
2	Perempuan	1	14,29%
	Jumlah	7	100%

2.2 Deskripsi Narasumber Menurut Umur

Deskripsi narasumber menurut umur dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 20-29 tahun, umur 30-39 tahun, dan narasumber dengan umur 40-49 tahun. Pada tabel 4.2 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori umur berikut.

Tabel 4.2

Deskripsi Narasumber Menurut Umur

No.	Umur	Frekuensi	Persentase
1.	20-29	1	14,29%
2	30-39	4	57,14%
	40-49	2	28,57%
	Jumlah	7	100%

2.3 Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh narasumber, maka distribusinya dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu S1 dan SMA. Pada Tabel 4.3 dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.3

Deskripsi Narasumber Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	S1	6	85,71%
2	SMA	1	14,29%
	Jumlah	7	100%

4.4 Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

Setiap orang mempunyai pekerjaan yang berbeda dan tak terkecuali pada pekerjaan narasumber. Maka akan dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Wirausaha. Pada tabel 4.4 akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing kategori sebagai berikut.

Tabel 4.4
Deskripsi Narasumber Menurut Pekerjaan

No.	Tingkat Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	PNS	3	42,86%
2	Wirausaha	4	57,14%
	Jumlah	7	100%

2. Deskripsi Hasil Wawancara

wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara individual dimana wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan berstruktur.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka dapat dianalisis satu persatu tentang jawaban narasumber sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut :

2.1 Adanya Tujuan Yang Dicapai

Mencapai suatu tujuan merupakan kegiatan yang mempunyai proses perencanaan, pengarahan, pengorganisasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran yang dapat di implementasikan melalui program atau formulasi kebijakan. Tujuan dari implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal adalah agar pengguna mengetahui tentang peraturan bupati ini dan meningkatkan kesadaran wajib retribusi akan pentingnya membayar retribusi parkir.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Bapak Ramlan Taufik S.Sos selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa dengan adanya tujuan dari Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal sudah dapat dikatakan berhasil. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir dengan menambah area parkir agar iuran parkir yang diterima dapat menambah fasilitas parkir dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dengan adanya hal tersebut masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola parkir sehingga perlu diadakan pelatihan kepada pengelola parkir yang bertugas ditempat-tempat yang telah ditentukan, dengan adanya pelatihan dan

mensosialisasi pentingnya tujuan dari retribusi parkir akan berdampak baik pada PAD.

Menurut Bapak Mangatas Tua ST selaku Kepala Badan Sarana dan Prasarana menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dilakukan dengan ketentuan yang ditetapkan. Objek yang disediakan oleh pemerintah daerah mampu memenuhi tempat parkir sehingga para pengguna parkir bisa merasa nyaman. Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan tempat-tempat dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang diharapkan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir. Namun masih banyak kendala yang didapat karena pengelola parkir memiliki SDM rendah dan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan parkir sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola parkir agar tidak ada penyalahgunaan atas uang yang telah dibayarkan untuk keperluan pribadi.

Berbeda halnya dengan hasil wawancara dari Bapak Alfi Anwar selaku pengelola parkir menyatakan bahwa tujuan yang dicapai sudah dijalankan dengan baik dan sudah mengetahui tujuan dari retribusi pelayanan parkir tersebut. Pelayanan parkir yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah sesuai dengan keinginan masyarakat, itu dibuktikan dengan adanya sosialisasi, penyuluhan, serta tempat parkir yang layak dan terjaga ketertibannya. Uang yang dibayarkan masyarakat pengelola parkir sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima sehingga masyarakat dengan senang hati membayarkan sebagian uangnya untuk parkir.

Sedangkan menurut Bapak Burhan yang juga sebagai pengelola parkir menyatakan bahwa tujuan yang dicapai masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Tempat parkir yang disediakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal masih banyak memiliki hambatan diakibatkan karena tempat parkir yang sempit sehingga mengganggu pengguna jalan. Namun pelayanan yang diterima sudah sesuai, dikarenakan kendaraan yang diparkirkan dapat terjaga dengan baik sehingga para pengguna parkir membayar iuran parkir tersebut. Dengan adanya hal tersebut maka akan meningkatkan PAD.

Wawancara dengan Bapak Khairul Anwar selaku pengguna jasa parkir (masyarakat) menyatakan bahwa tujuan retribusi pelayanan parkir belum diketahui oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena Dinas Perhubungan kurang melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang tujuan sebenarnya retribusi parkir tersebut. Pelayanan parkir yang diterima oleh masyarakat sudah sesuai dengan keinginan, itu ditandakan dengan pengelola parkir yang memiliki sikap yang sopan serta menjaga kendaraan mermotor tanpa ada goresan sedikitpun sehingga iuran yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima.

Menurut Bapak Dedi Iskandar selaku pengguna parkir (masyarakat) menyatakan bahwa tujuan retribusi pelayanan parkir yang dilakukan tidak diketahui oleh masyarakat, karena yang ia tahu hanya membayar begitu saja kepada pengelola parkir. Pelayanan yang diberikan belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat, itu dibuktikan dengan kendaraan yang diparkirkan tidak

ada pelindung dari sinar matahari sehingga pelayanan yang diterima harus lebih ditingkatkan kembali.

Menurut Ibu Nurhasanah yang juga pengguna parkir (masyarakat) menyatakan bahwa tujuan retribusi pelayanan parkir sudah diketahui oleh sebagian masyarakat, namun pihak dari dinas perhubungan masih kurang melakukan sosialisasi tentang retribusi parkir kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan juga belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat. Itu dibuktikan dengan adanya juru parkir yang menagih retribusi parkir diluar dari tarif yang seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap narasumber dapat disimpulkan bahwa tujuan yang dicapai dalam Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal telah tercapai. Itu dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir guna untuk meningkatkan pendapat asli daerah. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

2.2 Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang diterbitkan

Pengawasan adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri ke tempat pekerjaan dan menerima laporan-laporan dari pelaksana.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri, proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Bapak Ramlan Taufik S.Sos selaku sekretaris Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan sudah berjalan dengan baik yaitu dengan cara turun ke lapangan dan mengecek langsung setiap satu bulan sekali. Pengawasan yang diterbitkan masih perlu perbaikan ke petugas/pengelola parkir agar apa yang dilakukan mampu memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat yang terlibat dalam pengawasan tersebut.

Sedangkan wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Mangatas Tua ST selaku Badan sarana dan prasarana. Dengan adanya pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan sudah berjalan dengan baik, itu dibuktikan dengan adanya pengawasan langsung kelapangan serta melakukan pembinaan kepada pengelola parkir agar apa yang dilakukan tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal. Pengawasan yang dilakukan harus bekerja sama dengan semua anggota yang bekerja di Dinas Perhubungan agar pengawasannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Lain halnya dengan Bapak Alfi Anwar selaku pengelola parkir menyatakan bahwa pengawasan yang diberikan Dinas Perhubungan kepada pengelola parkir

belum dijalankan dengan baik, dibuktikan dengan jarang/tidak rutin pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum sesuai dengan yang diharapkan karena pengelola parkir berharap ada perhatian dari dinas perhubungan agar terus melakukan pengawasan perpajakan setiap satu bulan agar tercipta perparkiran yang tertib dan nyaman. Masyarakat juga terlibat didalam pengawasan retribusi pelayanan parkir karena masyarakat juga sebagai pengguna jasa parkir.

Menurut Bapak Burhan selaku pengelola parkir juga menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum semaksimal dengan apa yang diinginkan. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak rutin setiap bulannya sehingga sebagian dari pengelola parkir tidak memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir dan tidak memperhatikan kendaraan yang parkir bahkan meninggalkan begitu saja tanpa pengawasan dari seorang pengelola parkir atau petugas.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Khairul Anwar selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan masih belum sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Bapak Dedi Iskandar selaku pengguna parkir/masyarakat menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik karena kendaraan yang parkir di tepi jalan tidak dijaga oleh pengelola parkir, namun ketika masyarakat sudah selesai dalam urusannya dengan sigap pengelola parkir tersebut meminta uang parkir. Mau tidak mau masyarakatpun harus memberikan uang tersebut. Dengan begitu masyarakat terlibat didalam pengawasan retribusi pelayanan parkir karena dengan begitu masyarakat bisa mengadu kepada dinas secara langsung tentang pelayanan yang diberikan sebelumnya tidak semaksimal dengan apa yang diinginkan.

Menurut Ibu Nurhasanah juga selaku pengguna jasa parkir menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. itu dibuktikan bahwa masih sering terjadi kejanggalan mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar dari tarif yang seharusnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan yang telah diterbitkan perlu lebih maksimal karena masih kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang turun langsung ke lapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan kendaraan yang parkir di tepi jalan.

2.3 Adanya Program Yang Dilaksanakan

Program merupakan kesatuan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang dapat diimplementasikan, program pemungutan retribusi parkir bertujuan untuk

meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Program tersebut sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah. Tanpa adanya tujuan program tersebut retribusi parkir tidak bisa berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dengan Bapak Ramlan Taufik S.Sos selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. program kerja yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yaitu meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan. Program tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan demi kenyamanan pengguna angkutan jalan. Program ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya pelimpahan wewenang pelayanan retribusi parkir di tepi jalan umum di Dinas Perhubungan Mandailing Natal berupa pembangunan terminal dimana terminal adalah sebuah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang. Fungsi terminal tersebut mempermudah perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan umum.

Sedangkan menurut Bapak Mangatas Tua ST selaku badan sarana dan prasarana menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kembali tempat-tempat yang semestinya diterapkan di tempat yang telah ditentukan. Program yang dilakukan yaitu melalui pembinaan dan

pengawasan terhadap pengelola parkir. Program ini telah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun.

Bapak Alfi Anwar selaku pengelola parkir menyatakan bahwa program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik. program yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan yaitu dengan pembangunan terminal. Program yang dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya serta pelaksanaannya dilakukan dengan mengecek langsung. Program tersebut terlaksana dan dibuktikan dengan meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Menurut Bapak Burhan selaku pengelola parkir menyatakan bahwa program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik serta sudah diterapkan. Pelaksanaan program tersebut terlaksana dan dibuktikan dengan meningkatnya sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh dari Bapak Khairul Anwar selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa program peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sudah berjalan dengan tertib. Dengan adanya penyediaan terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum sehingga memudahkan konsumen dalam mendapatkan berbagai pelayanan dalam angkutan umum. Dengan adanya program tersebut membuat para wajib retribusi meningkatkan kesadarannya untuk membayarkan retribusi parkir, karena

menurutnya program tersebut membuat dinas dan juga wajib retribusi saling membutuhkan satu sama lain demi menjaga keamanan, ketentraman, serta kenyamanan dalam proses lalu lintas angkutan jalan.

Hal lain yang dinyatakan oleh Bapak Dedi Iskandar selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa program yang dilakukan Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah berjalan. Namun, program tersebut belum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dinas, hal itu dibuktikan dengan daya tampung area parkir yang dimiliki terminal tidak lagi mampu mendukung kebutuhan pengguna jasa terminal. Tempat parkir kendaraan yang sangat terbatas sehingga banyak memarkir kendaraannya disepanjang jalan dari clan menuju terminal.

Menurut Ibu Nurhasanah selaku masyarakat/pengguna parkir menyatakan bahwa program yang dilakukan Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah tertib. Itu dibuktikan dengan adanya program tersebut memudahkan pengguna jasa angkutan jalan dalam melakukan proses perjalanan dengan tertib serta kenyamanan dalam proses angkutan jalan.

Dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan tertib/tercapai, hal ini dibuktikan dari Dinas Perhubungan yang juga melakukan sosialisasi pembinaan dan kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya.

2.4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

Penentuan target penerimaan retribusi dapat menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan realisasi pemungutan retribusi parkir dalam kurun waktu yang ditentukan dan berdasar pada pencapaian target pada tahun sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Bapak Ramlan Taufik S.Sos selaku sekretaris Dinas Perhubungan Mandailing Natal menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, karena sedikitnya konsumen yang membayar parkir. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan untuk pencapaian target dilakukan dengan penyusunan kembali lokasi tempat-tempat parkir dan memperbaiki fasilitas parkir. Adapun faktor penghambat didalam retribusi pelayanan parkir yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar parkir, dan kurangnya pengawasan terhadap kendaraan parkir.

Sedangkan menurut Bapak Mangatas Tua ST selaku badan sarana dan prasarana menyatakan bahwa target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa parkir. Dalam pencapaian target yang dilakukan dengan cara memperluas tempat parkir dengan memperbaiki fasilitas serta kenyamanan dalam perparkiran agar terwujud tempat parkir yang tertib. Factor penghambat retribusi pelayanan parkir yaitu masih kurangnya masyarakat untuk membayar parkir. Rendahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola parkir dalam mengelola perparkiran dan pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat. Sehingga Dinas Perhubungan perlu melakukan pembinaan kepada pengelola parkir yang telah ditentukan.

Bapak Alfi Anwar selaku pengelola parkir juga menyatakan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi pelayanan parkir belum mencapai target yang diinginkan, sarana tempat perparkiran kurang memadai, dan fasilitas yang minim. Peran masyarakat sangat berpengaruh karena retribusi merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir. Faktor penghambat target yaitu kurangnya sosialisasi pembinaan dari Dinas Perhubungan.

Selain itu, Bapak Burhan selaku pengelola parkir juga menyatakan bahwa target retribusi yang akan dicapai juga belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, tempat perparkiran yang sempit, peran masyarakat sangat berpengaruh karena retribusi merupakan iuran yang dikeluarkan masyarakat yang sudah menggunakan jasa parkir. Faktor penghambatnya kurangnya fasilitas perparkiran yang disediakan oleh Dinas Perhubungan.

Diperoleh dari Bapak Khairul Anwar selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa target retribusi yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi pelayanan parkir belum mencapai target yang diinginkan, dan sarana tempat perparkiran yang kurang memadai. Adapun yang menjadi faktor penghambat tercapainya target yaitu kurang tertibnya dan ketidaknyamanan masyarakat untuk parkir ditepi jalan.

Dari Bapak Dedi Iskandar selaku pengguna jasa parkir/masyarakat menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk meningkatkan

target belum berjalan dengan baik sehingga targetnya belum tercapai. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya kenyamanan masyarakat dalam memarkirkan kendaraan terutama ditepi jalan umum.

Menurut Ibu Nurhasanah selaku pengguna jasa parkir/masyarakat juga menyatakan bahwa upaya yang dilakukan dinas perhubungan untuk meningkatkan target belum tercapai dikarenakan masih banyak yang melakukan parkir liar.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir. Padahal Dinas Perhubungan sudah melakukan perbaikan fasilitas tempat parkir dan menambah luas tempat perparkiran.

3. Pembahasan

Dari hasil penyajian data yang ada akan dianalisis dengan tetap merujuk kepada hasil interpretasi data tersebut sesuai dengan fokus dalam penelitian dari seluruh data yang telah diperoleh selama penelitian, baik dengan melakukan wawancara kepada informan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam memenuhi kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir di kabupaten Mandailing Natal.

3.1 Adanya Tujuan Yang dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka

Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Mandailing Natal, dengan adanya tujuan yang dicapai, sudah dikatakan berhasil, itu dibuktikan dengan adanya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir. Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelola parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

Adapun tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pencapaian peningkatan retribusi pelayanan parkir yaitu dengan mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir dengan mensosialisasikan pentingnya tujuan dari pendapatan retribusi parkir yang akan berdampak baik pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun masih terdapat kendala yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan parkir sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan kembali akan pentingnya retribusi parkir.

Berdasarkan pernyataan tersebut, jika dikaitkan dengan terori implementasi kebijakan publik. Dwijowijoto (2003:158) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anantara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Dwijowijoto (2003:158) dengan adanya tujuan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah menjalankan tujuannya dengan baik.

3.2 Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Mandailing Natal, adanya pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan perlu lebih maksimal karena masih kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang turun langsung kelapangan. Masyarakat berharap ada ketegasan yang dilakukan dinas untuk menertibkan dan memberikan kenyamanan kendaraan yang parkir.

Oleh karena itu Dinas Perhubungan harus terus meningkatkan pengawasan ke lapangan agar pemungutan retribusi berjalan dengan efektif dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar parkir.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori implementasi kebijakan. Subarsono (2005:101) menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis diantaranya kondisi lingkungan, hubungan antara organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anantara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Subarsono (2005:101) dengan adanya pengawasan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Mandailing Natal harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan.

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Mandailing Natal, dengan adanya program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sudah dapat dikatakan tercapai, ini dibuktikan dari pihak Dinas melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya sehingga dengan adanya program tersebut akan memberikan keuntungan kepada daerah itu sendiri.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Adapun program kerja yang dilakukan Dinas Perhubungan yaitu meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan daerah tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dibandingkan dengan teori Implementasi Kebijakan Publik. Implementasi Kebijakan Publik menurut Winarno (2005:102) merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi

publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa antara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Winarno (2005:102) dengan adanya program yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah menjalankan program dengan baik.

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Mandailing Natal, dengan adanya target yang akan dicapai belum dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target, dan sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir. Adanya target yang harus dicapai merupakan salah satu tujuan utama dalam memenuhi kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir dengan dilakukannya sosialisasi pembinaan untuk mengetahui keluhan pengguna jasa parkir tersebut. Didalam mencapai target ini juga dibutuhkan pengawasan yang baik. dimana target tersebut berupa banyaknya tempat penyedia parkir dan wajib retribusi orang pribadi atau badan.

Tabel 4.5

Realisasi Pencapaian Retribusi Parkir

Jenis Retribusi	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
Retribusi Parkir	2016	85.508,994,820	70.700,225,824,15	82,86%
Retribusi Parkir	2017	104.661,769,563,05	80.965,336,073,02	77,36%

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2017 realisasi retribusi parkir di Kabupaten Mandailing Natal tidak memenuhi target. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2016 target yang ingin dicapai oleh pemerintah sebesar Rp. 85.508,994,820 namun hanya menghasilkan realisasi sebesar Rp. 70.700,225,824,15. Kemudian, pada Tahun 2017 target yang ingin dicapai oleh pemerintah jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 104.661,769,563,05 akan tetapi realisasi yang dihasilnya hanya sebesar Rp. 80.965,336,073,02. Dapat dilihat bahwa persentase realisasi dari tahun 2016-2017 mengalami penurunan.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa selain target dan realisasi yang berubah-ubah dari tahun 2016-2017, juga tidak memenuhi target yang telah ditentukan. Salah satunya disebabkan oleh adanya parkir liar yang dilakukan oleh petugas yang tidak terdaftar di dispenda yang berdampak pada penurunan hasil retribusi pelayanan parkir. Adapun pengawasan yang dilakukan dengan melakukan monitoring ke lapangan serta evaluasi terhadap pekerja masing-masing pegawai sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Adanya target yang akan dicapai merupakan focus utama dalam suatu kebijakan karena itu dibutuhkan alternatif-alternatif yang dilakukan Dinas untuk terus berusaha agar ditahun berikutnya target akan meningkat dari pada tahun sebelumnya. Dengan disediakannya fasilitas perparkiran yang baik orang akan membayar parkir tersebut.

Berdasarkan pernyataan tersebut, apabila dikaitkan dengan teori implementasi. Tangkilisan (2003:29) menyatakan bahwa implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi eksekutif mengatur cara mengorganisasikan, menginterpretasikan, dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan dengan di atas bahwa anantara hasil wawancara dan dikaitkan dengan teori dari Tangkilisan (2003:29) dengan adanya target yang ingin dicapai, dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah menjalankan target dengan baik.

Dari 4 kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa;

1. tujuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal telah tercapai. Dengan melakukan usaha peningkatan terhadap sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat. Dengan menjalankan tugas yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal yang bertujuan untuk

pencapaian retribusi pelayanan parkir dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Mandailing Natal sudah dilakukan namun masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

3. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa adanya program yang akan dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti dengan melakukan sosialisasi juga melaksanakan program pengawasan setiap tahunnya.

4. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan bahwa adanya target yang akan dicapai belum tercapai karena retribusi parkir belum mencapai target dan juga sedikitnya konsumen yang memakai jasa parkir serta kurangnya tempat wilayah perparkiran.

BAB V

PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal telah terimplementasi walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal sudah terimplementasikan dengan baik, dibuktikan dengan bertambahnya tempat objek retribusi parkir, kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir, serta memberikan kenyamanan dan ketertiban terhadap pengguna jasa parkir.

Pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik. hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya ditemukan para pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis namun meminta uang parkir kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan masih belum maksimal dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Mengenai program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik seperti melakukan sosialisasi kepada pengelola parkir serta pengawasan setiap bulannya dan berupaya meningkatkan pelayanan parkir.

Target yang dicapai belum berjalan dengan baik karena retribusi parkir belum mencapai target dan sedikitnya konsumen yang membayar jasa parkir, serta kurangnya tempat wilayah perparkiran yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Hal-hal yang harus dibenahi oleh pemerintah daerah dalam hal mengenai retribusi parkir ialah meningkatkan pengawasan terhadap parkir liar dan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan dalam memenuhi masyarakat yang efektif.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut :

1. Adanya tujuan yang dicapai sudah terimplementasikan dengan baik, akan tetapi harus lebih ditingkatkan usaha serta menjalankan tugas sesuai dengan aturan Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
2. Adanya pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik, maka Dinas Perhubungan harus lebih sering melakukan pengawasan dan turun langsung ke lapangan dan mengecek setiap bulannya.

3. Adanya program yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, tetapi harus lebih ditingkatkan pelayanannya agar masyarakat merasa nyaman serta memarkirkan kendaraan.

4, Adanya target yang akan dicapai belum berjalan dengan baik, maka Dinas Perhubungan Harus lebih sering mengadakan sosialisasi agar pemungutan retribusi berjalan dengan efektif dan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik. 1(1):55-65
- D, Riant, Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ilosa, Abdiana, 2016. *Kualitas Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Yogyakarta*. NATAPRAJA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 4(2):107-126
- Kusumaningtyas, Rinda Hesti. 2016. *Evaluasi dan Perancangan Sistem Informasi Lahan Parkir*. Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi. 9(1):15-27
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

*Perundang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.*

*Peraturan Bupati nomor 16 tahun 2012 tentang pengelolaan retribusi pelayanan
parkir ditepi jalan umum.*

Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta:
Cipta Dunia.

Siahaan, Marihot Pahala. 2019. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta:
Rajawali Pers.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI Bandung – puslit KP2W
Lemit Unpad Bandung.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta :
Lukman Offset YPAPI.

Wahab, Abdul, Solichin. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Yogyakarta:
Media Pressindo.

Yani, Ahmad. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Dinas Perhubungan

Nama : Ramlan Taufik S.Sos

Usia : 39 Tahun

Jabatan : Sekretaris Dinas Perhubungan

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir di Mandailing Natal sudah dijalankan?

Jawab : sudah dijalankan, Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam memenuhi kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir dengan menambah area parkir agar iuran parkir yang diterima dapat menambah fasilitas parkir dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

- b. apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir sudah efektif?

Jawab : belum efektif

- c. apakah kendala-kendala dalam meningkatkan kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir sudah teratasi selama ini?

Jawab : belum teratasi,karena masih kurangnya sumber daya manusia (SDM) dari pengelola parkir sehingga perlu diadakan pelatihan kepada pengelola parkir yang bertugas ditempat-tempat yang telah ditentukan,

dengan adanya pelatihan dan mensosialisasi pentingnya tujuan dari retribusi parkir akan berdampak baik pada PAD.

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. siapa yang mengawasi pemungutan retribusi parkir?

Jawab : subbagian umum

- b. bagaimana cara yang dilakukan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : pengawasan dilakukan dengan cara turun ke lapangan dan mengecek langsung setiap satu bulan sekali

- c. apakah pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif?

Jawab : : Pengawasan yang diterbitkan masih perlu perbaikan ke petugas/pengelola parkir agar apa yang dilakukan mampu memberikan kinerja yang baik kepada masyarakat dan yang terlibat dalam pengawasan tersebut

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah ada atau tidak program yang dilaksanakan dinas perhubungan mandailing natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan?

Jawab : ya, ada

- b. Apakah program yang dilaksanakan dinas perhubungan mandailing natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan terealisasi?

Jawab : sejauh ini sudah teralisasi, itu dibuktikan dengan tersebut mempermudah perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus kendaraan umum.

- c. Bagaimanakah cara agar program yang dilaksanakan dinas perhubungan mandailing natal dalam meningkatkan ketertiban pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan dengan efektif?

Jawab : Program tersebut dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan umum demi keselamatan kendaraan pengguna jalan.

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah ada target retribusi yang diberikan oleh atasan kepada dinas perhubungan?

Jawab : ya, ada.

- b. Bagaimana upaya dinas perhubungan agar target retribusi tersebut bisa tercapai?

Jawab : uapaya yang dilakukan untuk pencapaian target dilakukan dengan penyusunan kembali lokasi tempat-tempat parkir dan memperbaiki fasilitas parkir.

- c. Apakah setiap tahunnya target tersebut tercapai?

Jawab : Tidak, karena retribusi parkir belum mencapai target yang diinginkan dan sedikitnya masyarakat yang memakai jasa parkir.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Dinas Perhubungan

Nama : Mangatas Tua ST

Usia : 37 Tahun

Jabatan : Badan Sarana dan Prasarana

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir di Mandailing Natal sudah dijalankan?

Jawab : sudah dijalankan, Usaha yang dilakukan Dinas Perhubungan memberikan tempat-tempat dengan kualitas keamanan dan ketertiban yang diharapkan masyarakat serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir

- b. apakah kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir sudah efektif?

Jawab : belum efektif

- c. apakah kendala-kendala dalam meningkatkan kepatuhan penerapan tarif retribusi parkir sudah teratasi selama ini?

Jawab : belum teratasi,karena pengelola parkir memiliki SDM rendah dan kurangnya pengetahuan tentang pelayanan parkir sehingga perlu diadakan sosialisasi dan pembinaan kepada pengelola parkir agar tidak ada penyalahgunaan atas uang yang telah dibayarkan untuk keperluan pribadi.

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. siapa yang mengawasi pemungutan retribusi parkir?

Jawab : subbagian umum

- b. bagaimana cara yang dilakukan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : dengan adanya pengawasan langsung kelapangan serta melakukan pembinaan kepada pengelola parkir agar apa yang dilakukan tidak mengalami kesalahan dengan apa yang telah diterapkan oleh Dinas Perhubungan Mandailing Natal.

- c. apakah pengawasan yang dilakukan berjalan dengan efektif?

Jawab : belum, Pengawasan yang dilakukan harus terus bekerja sama dengan semua anggota yang bekerja di Dinas Perhubungan agar pengawasannya sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah ada atau tidak program yang dilaksanakan dinas perhubungan mandailing natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan?

Jawab : ya, ada

- b. Apakah program yang dilaksanakan dinas perhubungan mandailing natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan terealisasi?

Jawab : sejauh ini sudah teralisasi, program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kembali tempat-tempat yang semestinya diterapkan di tempat yang telah ditentukan.

- c. Bagaimanakah cara agar program yang dilaksanakan dinas perhubungan mandailing natal dalam meningkatkan ketertiban pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berjalan dengan efektif?

Jawab : Program yang dilakukan yaitu melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola parkir. Program ini telah dilaksanakan setiap bulan dan diperiksa pada akhir tahun

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah ada target retribusi yang diberikan oleh atasan kepada dinas perhubungan?

Jawab : ya, ada.

- b. Bagaimana upaya dinas perhubungan agar target retribusi tersebut bisa tercapai?

Jawab : dengan cara memperluas tempat parkir dengan memperbaiki fasilitas serta kenyamanan dalam perparkiran agar terwujud tempat parkir yang tertib

- c. Apakah setiap tahunnya target tersebut tercapai?

Jawab : Tidak, karena masih rendahnya sumber daya manusia (SDM) pengelola parkir dalam mengelola perparkiran dan pengelola parkir yang tidak memakai atribut dan tidak memberikan karcis kepada masyarakat. Sehingga Dinas Perhubungan perlu melakukan pembinaan kepada pengelola parkir yang telah ditentukan.

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Pengelola Parkir

Nama : Alfi Anwar

Usia : 28 Tahun

Jabatan : pengelola parkir

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal?

Jawab : Iya, Tahu.

- b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut ?

Jawab : tidak ada.

- c. Menurut Bapak, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab :sudah sesuai, masyarakat dengan senang hati membayar sebagian uangnya untuk parkir.

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. Apakah Bapak mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : iya, tahu.

- b. Menurut Bapak, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : belum, dibuktikan dengan jarang nya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : dengan melakukan pengawasan perparkiran setiap bulan

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : iya, tahu

- b. Menurut Bapak, apakah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sudah tertib?

Jawab : sudah.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya serta pelaksanaannya dilakukan dengan mengecek langsung program tersebut.

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam mencapai target?

Jawab : ya, tahu.

b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya jumlah target ?

Jawab : sarana tempat perparkiran kurang memadai, dan fasilitas yang minim.

c. Menurut Bapak, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan ?

Jawab : ya, perlu

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

**Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam
Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di
Kabupaten Mandailing Natal**

A. Pihak Pengelola Parkir

Nama : Burhan

Usia : 36 Tahun

Jabatan : pengelola parkir

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal?

Jawab : Iya, Tahu. Namun belum tercapai

- b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut ?

Jawab : tempat parkir yang sempit sehingga mengganggu pengguna jalan.

- c. Menurut Bapak, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab :sudah sesuai.

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. Apakah Bapak mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : iya, tahu. Tetapi belum maksimal.

- b. Menurut Bapak, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : belum.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : dengan memberikan karcis kepada masyarakat yang menggunakan jasa parkir.

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : iya, tahu

- b. Menurut Bapak, apakah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sudah tertib?

Jawab : sudah.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : dengan melakukan sosialisasi juga pengawasan setiap bulannya serta pelaksanaannya dilakukan dengan mengecek langsung program tersebut.

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam mencapai target?

Jawab : ya, tahu.

b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya jumlah target ?

Jawab : tempat parkir yang sempit

c. Menurut Bapak, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan ?

Jawab : ya, perlu

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Pengguna jasa parkir/masyarakat

Nama : Khairul Anwar

Usia : 49 Tahun

pekerjaan : masyarakat/ pengguna jasa parkir

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal?

Jawab : tidak.

- b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut ?

Jawab : kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan

- c. Menurut Bapak, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab :sudah

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- d. Apakah Bapak mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : iya, tahu.

- a. Menurut Bapak, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : belum.

- b. Menurut Bapak, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : iya, tahu

- b. Menurut Bapak, apakah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sudah tertib?

Jawab : sudah.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : dengan penyediaan terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam mencapai target?

Jawab : ya, tahu.

b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya jumlah target ?

Jawab : kurang tertibnya kenyamanan masyarakat untuk parkir khususnya di tepi jalan.

c. Menurut Bapak, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan ?

Jawab : ya, perlu

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Pengguna jasa parkir/masyarakat

Nama : Dedi Iskandar

Usia : 30 Tahun

pekerjaan : masyarakat/ pengguna jasa parkir

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal?

Jawab : tidak.

- b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut ?

Jawab : tempat parkir yang kurang memadai.

- c. Menurut Bapak, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab : belum sesuai dengan pelayanan yang diterima.

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. Apakah Bapak mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : iya, tahu.

- b. Menurut Bapak, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : belum.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : iya, tahu

- b. Menurut Bapak, apakah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sudah tertib?

Jawab : sudah.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : dengan penyediaan terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam mencapai target?

Jawab : ya, tahu.

- b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya jumlah target ?

Jawab : kurang tertibnya kenyamanan masyarakat untuk parkir khususnya di tepi jalan.

- c. Menurut Bapak, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan ?

Jawab : ya, perlu

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA DAN HASIL WAWANCARA

Judul :Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal

A. Pihak Pengguna jasa parkir/masyarakat

Nama : Nurhasanah

Usia : 42 Tahun

pekerjaan : masyarakat/ pengguna jasa parkir

1. Adanya Tujuan Yang Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal?

Jawab : tidak.

- b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penghambat dalam tujuan tersebut ?

Jawab : kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pihak Dinas Perhubungan

- c. Menurut Bapak, apakah retribusi pelayanan parkir yang dibayarkan sudah sesuai dengan pelayanan yang diterima?

Jawab :sudah

2. Adanya Pengawasan Terhadap Kebijakan Yang Diterbitkan

- a. Apakah Bapak mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan agar pengawasan tersebut berjalan dengan baik?

Jawab : iya, tahu.

- b. Menurut Bapak, apakah pengawasan yang dilakukan sudah tertib?

Jawab : belum.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pengelola retribusi parkir?

Jawab : melakukan pengawasan langsung dengan turun ke lapangan

3. Adanya Program Yang Dilaksanakan

- a. Apakah Bapak mengetahui program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Mandailing Natal dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : iya, tahu

- b. Menurut Bapak, apakah program yang dilaksanakan Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan sudah tertib?

Jawab : sudah.

- c. Menurut Bapak, bagaimana bentuk yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan dalam meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan ?

Jawab : dengan penyediaan terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan angkutan umum

4. Adanya Target Retribusi Yang Akan Dicapai

- a. Apakah Bapak mengetahui upaya yang dilakukan dinas perhubungan dalam mencapai target?

Jawab : ya, tahu.

b. Menurut Bapak, apa yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya jumlah target ?

Jawab : kurang tertibnya kenyamanan masyarakat untuk parkir khususnya di tepi jalan.

c. Menurut Bapak, apakah diperlukan peran masyarakat setempat dalam hal pencapaian target yang dilakukan dinas perhubungan ?

Jawab : ya, perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : RIZKA PUTRI
Tempat/TglLahir :Kotanopan, 12 Agustus 1998
NPM : 1603100025
JenisKelamin :Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Padang BulanMuaraSoro
Anakke : 4

Nama Orang Tua

Ayah :Khairul Anwar
Ibu :SitiAminah
Alamat : Padang BulanMuaraSoro

Pendidikan Formal

1. SD Negeri 194 PagaranBaru, (2004-2010)
 2. SMP Negeri 1 Kotanopan, (2010-2013)
 3. SMA Negeri 1 Kotanopan, (2013-2016)
 4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
- Dengan demikian riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2020

RIZKAPUTRI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGESKIPAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: 397/KET/IL.2-AU/UMSU-P/M/2020

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Riika Putri
NPM : 1603100025
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Negara

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Rajab 1441 H
28 Februari 2020 M

Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
SIP UMSU

Medan, 23 Desember 2019.

Edan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RIFA PURFI
N P M : 1603100008
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Tabungan sks : 18 sks, IP Kumulatif 3,86.

Sehubungan dengan mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No.	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kecamatan Kotanopan	<i>[Signature]</i>
2	Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 13 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Penetapan Retribusi Pelayanan Pasar di Kecamatan Kotanopan	
3	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Dalam Rangka Objek dan Subjek Pajak di Provinsi Lampung Utara.	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- 1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
- 2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan;
- 3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Ditetapkan Judul dan Pembimbing

Medan, tgl.20....

Ketua,
[Signature]

Pemohon,

[Signature]
(RIFA PURFI)

[Signature]
Pembimbing: Dedi Amizal



UIN, Cerdas & Terpercaya

menjawab surat ini agar dibuktikan dan tanggapinya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 10.027/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 23 Desember 2019 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RIZKA PUTRI**
N P M : 1603100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEPATUHAN PENERAPAN
TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

Pembimbing : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 23 Desember 2020.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 20 Jumadil Awal 1441 H
16 Januari 2020 M


Dekan
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Bertanggungjawab



Unggul, Cerdas, dan Berprestasi
Ibu menjabarkan surat ini agar diketahui dan ditanggapi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 08 Januari 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : RIZKA PUTRI
N P M : 160300009
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/IL3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 16 Tahun 2012 Dalam Rangka Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Publik di Tepi Jalan umum Kecamatan Kotanopan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)

Demikianlah permohonan saya untuk penguasaan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui:
Pembimbing
(Dedi Anindal)

Pemohon,
(Rizka Putri)

UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 009/KEP/II.3-A/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Hari, Tanggal : Jumat, 10 Januari 2020
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyelaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penanggung	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
11	PUSPA MADALIN RANGHUTY	1603100075	Drs. H. BANGUN NAPTUPULLU M. Si.	DED AMRIZAL, S.Sos. M.Si	KOORDINASI PIMPINAN DALAM REVITALISASI PASAR GABAH DI KOTA TEBING TINGGI
12	RIZKA PUTRI	1603100025	NAULI KHAIIRAH, S.P., M.Pd	DED AMRIZAL, S.Sos. M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN EUPATI MANDULUNG NATAL NOMOR 16 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KECAMATAN KOTAKAMPAY
13	WINDANI PRATIWI	1603100024	NAULI KHAIIRAH, S.P., M.Pd	IDA MARTIRELLY, SH. MM	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI CALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM KARTU IDENTITAS ATUR DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KAB. LABuhanBATU SELATAN
14	JENNI PURNAMA LUBIS	1603100086	SYAFRUDDIN, S.Sos. M.H	DED AMRIZAL, S.Sos. M.Si	EFEKTIVITAS PROGRAM SAMSAT NELUWIG DALAM RANGKA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DESA SICCADAI
15	NABILA UTAR SPEGAR	1603100073	Drs. R. KUSNADI, M.A.P	DED AMRIZAL, S.Sos. M.Si	STRATEGI RELONASI PASAR MODERN DI PERUSAHAAN DAERAH PASAR INDUK CUREH B REUEN

Menden, 12 Januari Awal 1441 H
08 Januari 2020 M





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basud No. 1 Medan 20138 Telp. (061) 461797 - (061) 4619450 F. (061) 4617201 Fax (061) 4625474
 Website: http://www.umhu.ac.id E-mail: rektor@umhu.ac.id

BERTAKARIBLAH BERTAKARIBLAH
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

SK-5

Nama lengkap
 NPM
 Jurusan
 Judul Skripsi

RIFA PURFI
1603100025
Ilmu Administrasi Publik
Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012 Dalam
Rangka Menenuhi Keputusan Pemerintah Tarif Retensi Jars di Mandailing

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	30/12/2019	Bimbingan bab III Perbaikan proposal dari bab I sampai	
2.	04/01/20	Perbaikan Letter Bekasus Masalah	
3.	05/01/20	Perbaikan Penulisan dan tambahan teori	
4.	7/1/20	Acc Seminar Proposal	
5.	26/01/20	Bimbingan Prof Wawancara	
6.	27/01/20	Acc Prof Wawancara	
7.	28/01/20	Bimbingan Bab IV-V	
8.	05/02/20	Perbaikan Kesimpulannya dan Abstrak	
9.	26/02/20	Acc Skripsi	

Medan,20

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing ke : ...



Keagamaan, Cerdas, dan Tanggungjawab
Bila menjawab surat ini agar dibubuhkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 051/KETAL3-AU/UMSU-03/F/2020
Lampiran : -
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 02 Jumadil Akhir 1441 H
27 Januari 2020 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Perhubungan Mandailing Natal
di-
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr,Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RIZKA PUTRI**
N P M : 1603100025
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2019/2020
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEPATUHAN PENERAPAN
TARIF RETRIBUSI PARKIR DI KABUPATEN MANDAILING
NATAL.**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Payalotung, Telp. (0636) 326162 Kode Pos 22978
PANYABUNGAN

Panyabungan, 21 Februari 2020

800/008/DISHUB/2020
Penting
Pemberitahuan Telah
Melaksanakan Penelitian

Kepada
Yth. Dekan Fskultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 074/0073/DISHUB/2020, tanggal 03 Februari 2020 perihal Izin Mengadakan Penelitian.

Berkenaan dengan hal tersebut dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : RIZKA PUTRI
NPM : 1603100021
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : " Implementasi Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2012
Dalam Rangka Memenuhi Kepatuhan Penerapan Tarif
Retribusi Parkir di Kabupaten Mandailing Natal"
Instansi Penelitian : Dinas Perhubungan
Terhitung Mulai : 03 Februari s/d 20 Februari 2020

Benar telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MANDAILING NATAL

HENDRA BOISA PUTRA, AP, MM
PEMBINA TK.1
NIP. 19770403 1996612 1 001

